

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
MELALUI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PADA DINAS KOMINFO DI KABUPATEN PATI
PROVINSI JAWA TENGAH**

Nadya Veronica

NPP. 32.0458

Asdaf Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: 32.0458@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Baharuddin Thahir, S. Sos., M. Si.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Public information disclosure is a fundamental obligation of the government to ensure transparency and accountability. The implementation of public information disclosure policy in Pati Regency, managed through the Information and Documentation Management Officer (PPID), still faces challenges, such as limited human and technological resources and low public awareness. Based on empirical findings, the quality of policy implementation remains suboptimal in terms of access and public engagement. **Purpose:** This research aims to analyze the implementation of the public information disclosure policy through PPID at the Department of Communication and Informatics of Pati Regency and what are the supporting and inhibiting factors of the policy implementation. **Method:** This research applies a descriptive qualitative method using interviews, observation, and documentation as data collection techniques. **Result:** The findings reveal that although the implementation has been carried out according to regulations, it is hindered by insufficient technological infrastructure, limited staff capacity, and a lack of public understanding of PPID's role. However, support from local government in terms of regulations and funding plays a key role in supporting successful implementation. **Conclusion:** To improve implementation, it is necessary to strengthen human resource capacity, expand the use of digital platforms, and enhance public outreach through innovative and engaging information dissemination methods. This research is expected to serve as a reference for developing a more effective and participatory information service system.

Keywords: Policy Implementation, Public Information Disclosure, PPID

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban dasar pemerintah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Pati melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi serta rendahnya kesadaran masyarakat. Berdasarkan temuan empiris, kualitas implementasi kebijakan ini belum optimal terutama dalam hal aksesibilitas dan partisipasi publik. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik melalui PPID pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati serta apa saja faktor pendukung dan penghambat dari implementasi kebijakan tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan dan memahami secara mendalam kebijakan publik yang terjadi, khususnya implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Penelitian dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati dengan teknik *purposive sampling* dan *incidental sampling*. Informan utama terdiri dari 6 informan, yang terdiri dari

Sekda Kabupaten Pati, Kepala Dinas, Kepala Bidang, Pejabat Fungsional, Pranata Humas, Pelaksana PPID di Diskominfo, serta masyarakat. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Data dianalisis secara tematik melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan, namun masih terkendala oleh keterbatasan infrastruktur teknologi, kapasitas staf yang terbatas, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peran PPID. Meskipun demikian, dukungan pemerintah daerah dalam bentuk regulasi dan pendanaan menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi. **Kesimpulan:** Untuk meningkatkan efektivitas implementasi, perlu dilakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, perluasan penggunaan platform digital, serta peningkatan strategi sosialisasi kepada masyarakat dengan pendekatan yang inovatif dan menarik. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam mengembangkan sistem pelayanan informasi yang lebih efektif dan partisipatif.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Keterbukaan Informasi Publik, PPID

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Revolusi Industri 4.0 merupakan era modernisasi di mana berbagai aspek kehidupan dituntut untuk mengadopsi teknologi dalam setiap aktivitasnya. Perkembangan ini menuntut integrasi teknologi dalam berbagai bidang, dengan tantangan utama berupa inovasi untuk menciptakan layanan publik yang lebih efektif dan efisien. Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi di Indonesia, terbuka peluang besar dalam pemanfaatan teknologi, seperti penyebaran informasi, penggunaan internet sebagai media komunikasi, serta pengembangan layanan publik oleh pemerintah (Wahyudi, 2023). Menurut Janowski dkk (2012) mengategorikan seluruh jaringan kebijakan yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), jaringan kolaboratif, serta jaringan tata kelola sebagai bagian dari Jaringan Informasi Pemerintah. Penerapan TIK dalam institusi pemerintahan, termasuk pembentukan Jaringan Informasi Pemerintah, merupakan bagian dari transformasi yang lebih luas yang dikenal sebagai Pemerintahan Elektronik (*Electronic Government*). Istilah ini digunakan ketika TIK dimanfaatkan untuk mereformasi struktur internal dan proses kerja pemerintahan, atau disebut *E-Government* saat TIK digunakan untuk membangun kembali hubungan antara pemerintah dengan warga negara, sektor bisnis, aktor non-negara lainnya, serta lembaga pemerintahan lainnya.

Menurut Zhang (2016) kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melemahkan kendali negara dalam mengatur penyediaan dan distribusi informasi. Reformasi di Indonesia membawa perubahan signifikan menuju pemerintahan yang transparan dan akuntabel (*good governance*). Salah satu wujudnya adalah keterbukaan informasi publik yang dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28F serta diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Pemerintah, melalui regulasi tersebut, berkomitmen meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi guna menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi sebagai bentuk transparansi pemerintah. Dalam mendukung hal tersebut, *e-government* diterapkan melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik, transparansi, efisiensi, serta pemahaman masyarakat terhadap informasi. Menurut Indrajit (2007), *e-government* memiliki beberapa manfaat, sedangkan Layne & Lee (2001) membaginya ke dalam empat tahap pengembangan, mulai dari penyediaan informasi statis hingga integrasi layanan antar lembaga pemerintah.

Menurut Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo dalam Septina (2025) bahwa gagasan tentang keterbukaan informasi publik sejalan dengan nawacita keempat Presiden Joko Widodo, yang menekankan pentingnya kehadiran pemerintah melalui pembangunan tata kelola yang bersih, efektif, demokratis, dan dapat dipercaya. Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi, dibentuklah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai pengelola layanan informasi publik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pihak yang bertugas dalam mengelola informasi dan dokumentasi, mulai dari proses pengumpulan, pencatatan, penyimpanan, pemeliharaan, hingga penyediaan dan pendistribusian informasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri serta Pemerintah Daerah. Di Kabupaten Pati, pelaksanaan tugas PPID berada di bawah naungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), dengan dukungan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan. Penggunaan teknologi, khususnya melalui website resmi PPID, menjadi instrumen penting untuk menunjang keterbukaan informasi yang efektif dan efisien. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, PPID Kabupaten Pati telah membuat website resmi yang bertujuan untuk menjadi wadah bagi masyarakat yang memerlukan informasi publik. Berikut merupakan tampilan dari website resmi PPID Kabupaten Pati:



Meski menunjukkan perkembangan positif dengan meningkatnya indeks keterbukaan informasi dalam tiga tahun terakhir, implementasi PPID di Kabupaten Pati masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak atas informasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan keterbukaan informasi dilakukan melalui PPID dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Pati melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menunjukkan kemajuan yang signifikan, tercermin dari peningkatan skor evaluasi informatif secara bertahap sejak tahun 2022 hingga 2024. Namun demikian, berdasarkan temuan lapangan dan data yang diungkapkan dalam penelitian ini, masih terdapat tantangan nyata yang menghambat optimalisasi pelaksanaan kebijakan tersebut. Permasalahan utama mencakup keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap hak atas informasi publik.

Sebagian besar penelitian terdahulu mengenai keterbukaan informasi publik dan PPID lebih berfokus pada kualitas pelayanan (Waskito, 2024), evaluasi implementasi kebijakan secara umum (Sjoraida, 2015), atau peran komunikasi dan organisasi (Aprilya & Fadhlain, 2022). Namun, kajian yang secara khusus dan komprehensif mengangkat dimensi implementasi kebijakan berdasarkan teori Thomas R. Dye (2017) yang mencakup organisasi

pelaksana, pedoman atau aturan, anggaran, sumber daya manusia, dan teknologi masih belum banyak dilakukan, khususnya pada level pemerintah daerah kabupaten seperti di Pati.

Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan mengadopsi pendekatan teoritis dari Dye sebagai kerangka analisis utama dalam menilai implementasi keterbukaan informasi melalui PPID. Pendekatan ini memberikan keunggulan dalam memahami pelaksanaan kebijakan secara lebih sistematis dan menyeluruh, serta mampu menyoroti aspek-aspek yang selama ini luput dari perhatian penelitian sebelumnya, seperti struktur organisasi pelaksana dan dukungan infrastruktur teknologi secara spesifik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan teori implementasi kebijakan, serta masukan praktis bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas PPID sebagai garda depan keterbukaan informasi publik.

1.3 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu memberikan wawasan penting terkait pelaksanaan keterbukaan informasi publik serta peran PPID dalam pengelolaan informasi pemerintahan. Waskito (2024) meneliti kualitas pelayanan PPID di Kota Makassar dan menemukan bahwa pelayanannya masih belum optimal. Penelitian ini menggunakan teori kualitas pelayanan publik dan berfokus pada aspek pelayanan, berbeda dengan penelitian ini yang menekankan pada implementasi kebijakan secara menyeluruh. Sjoraida (2015) dalam penelitiannya di Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyimpulkan bahwa implementasi keterbukaan informasi publik belum berjalan optimal karena rendahnya komitmen dan sejumlah kendala struktural. Penelitian ini menggunakan teori implementasi dari Riant Nugroho dan fokus pada level provinsi, sedangkan penelitian ini dilakukan pada level kabupaten. Aprilya dan Fadhlain (2022) mengkaji peran PPID di Kabupaten Simeulue, Aceh, dan menyatakan bahwa pelayanan informasi berjalan dengan cukup baik. Namun, penelitian mereka menggunakan pendekatan komunikasi organisasi dan lebih fokus pada peran PPID secara deskriptif, bukan pada aspek implementasi kebijakan secara teoritis. Perdana, Asrinaldi, dan Asmawi (2018) menganalisis implementasi UU KIP di Kota Pariaman dan menyimpulkan bahwa meskipun struktur kebijakan telah dibentuk, pelaksanaannya belum maksimal. Mereka menggunakan teori implementasi dari Edward III, sementara penelitian ini mengadopsi pendekatan dari Thomas R. Dye yang lebih luas. Penelitian oleh Indah dan Hariyanti (2018) di Kota Tasikmalaya menemukan bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi publik dilakukan oleh tim KIM (Kelompok Informasi Masyarakat), bukan oleh PPID seperti di Kabupaten Pati. Ini menunjukkan variasi dalam pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi di daerah, sekaligus menjadi pembeda utama dengan penelitian ini.

Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini secara khusus menggunakan teori implementasi kebijakan Thomas R. Dye (2017) yang mencakup lima dimensi (Organisasi Pelaksana, Pedoman/Aturan, Anggaran, SDM, dan Teknologi) untuk menganalisis implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik melalui PPID pada Dinas Kominfo di Kabupaten Pati. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis yang lebih menyeluruh dalam memahami dinamika pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat kabupaten.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah dengan memfokuskan analisis pada implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kabupaten Pati, menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan dari Thomas R. Dye (2017) yang mencakup lima dimensi: organisasi pelaksana, pedoman atau aturan, anggaran, sumber daya manusia, dan teknologi. Penggunaan teori ini

menjadi pembeda utama karena belum banyak digunakan secara komprehensif dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya hanya menyoroti aspek pelayanan, komunikasi organisasi, atau efektivitas akses informasi secara terpisah.

Kebaruan lainnya terletak pada fokus penelitian terhadap hubungan antara struktur kelembagaan PPID dan efektivitas pelaksanaan keterbukaan informasi, terutama dalam konteks daerah yang sedang berkembang secara digital seperti Kabupaten Pati. Penelitian ini juga menyajikan data terbaru mengenai evaluasi pelayanan PPID berdasarkan permohonan informasi dan kategori informativeness yang belum banyak diungkap dalam literatur terdahulu. Selain itu, pemilihan lokus penelitian di Kabupaten Pati yang secara administratif memiliki tingkat partisipasi masyarakat dan penguatan kelembagaan yang berbeda dari kota-kota besar menjadi kontribusi empiris baru yang memperkaya studi tentang implementasi kebijakan publik di tingkat kabupaten. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memperluas penerapan teori implementasi dalam konteks nyata, tetapi juga memberikan rekomendasi strategis untuk optimalisasi peran PPID dalam mendukung keterbukaan informasi publik yang transparan dan akuntabel di daerah.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Pati, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses implementasi tersebut.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Pati. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara komprehensif dinamika pelaksanaan kebijakan dalam konteks nyata serta mengungkap faktor-faktor pendukung dan penghambat berdasarkan pengalaman langsung para pelaku di lapangan (Nurdin & Hartati, 2019). Menurut Simangunsong (2017) secara umum, setiap penelitian baik dalam bidang sosial maupun yang dilakukan oleh pemerintah, sangat bergantung pada data sebagai sumber informasi utama untuk mengungkapkan hakikat dari subjek yang diteliti. Metode kualitatif bersifat interpretatif dan menekankan makna subjektif dari setiap tindakan sosial, sehingga data yang diperoleh berasal dari penafsiran terhadap fenomena empiris yang ditemukan di lapangan. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi terhadap berbagai kegiatan serta kebijakan terkait keterbukaan informasi.

Informan penelitian dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling untuk pejabat kunci, seperti Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, dan pelaksana PPID. Selain itu, teknik incidental sampling digunakan untuk menjangkau masyarakat yang pernah berinteraksi atau mengajukan permohonan informasi melalui PPID. Pemilihan informan ini dimaksudkan untuk mendapatkan perspektif yang beragam dan relevan terhadap pelaksanaan kebijakan.

Observasi dilakukan secara sistematis, yaitu dengan mengamati secara langsung proses pelayanan informasi publik di Dinas Kominfo Kabupaten Pati, termasuk pemanfaatan website resmi PPID. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk mengkaji dokumen-dokumen pendukung seperti Peraturan Bupati, SOP PPID, laporan evaluasi keterbukaan informasi, dan data permohonan informasi publik dari tahun 2022 hingga 2024. Analisis data dilakukan dengan teknik Miles dan Huberman, yang meliputi: (1) reduksi data, yaitu proses

memilah data yang relevan; (2) penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif; dan (3) penarikan kesimpulan berdasarkan pola dan kecenderungan yang ditemukan selama proses penelitian. Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan prinsip triangulasi dengan mengombinasikan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Seluruh analisis dalam penelitian ini mengacu pada teori implementasi kebijakan Thomas R. Dye (2017), yang menilai pelaksanaan kebijakan melalui lima dimensi: organisasi pelaksana, pedoman atau aturan, anggaran, sumber daya manusia, dan teknologi. Teori ini memberikan kerangka kerja sistematis dalam mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi di tingkat kabupaten, serta membantu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja PPID di Kabupaten Pati.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Pati

Menurut Hill and Hupe (dalam Handoyo 2012:93) menyebutkan bahwa implementasi kebijakan merupakan sebuah hubungan antara harapan kebijakan dengan hasil kebijakan itu sendiri. Implementasi ini didasarkan kepada keputusan. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang memiliki peran penting, yaitu pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan. Menyikapi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pati menetapkan Peraturan Bupati Pati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati yang bertujuan untuk menciptakan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pati yang berkualitas. Untuk mengimplementasikan peraturan tersebut, maka dibentuklah suatu tim atau organisasi yang bertugas dalam urusan keterbukaan informasi publik. Maka dari itu, dibentuklah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mendokumentasikan, menyimpan, memelihara, menyediakan, mendistribusikan, serta memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati. Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Pati dianalisis berdasarkan teori implementasi kebijakan dari Thomas R. Dye yang mencakup lima dimensi utama, yaitu Organisasi Pelaksana, Pedoman atau Aturan, Anggaran, Sumber Daya Manusia dan Teknologi. Kelima dimensi tersebut menjadi dasar untuk menilai sejauh mana implementasi dan efektivitas pelaksanaan keterbukaan informasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di bawah naungan Dinas Kominfo Kabupaten Pati.

3.1.1 Organisasi Pelaksana

Diskominfo Kabupaten Pati memiliki tugas dan wewenang untuk menjadi pengelola sekaligus menjadi pihak yang memberikan informasi dan dokumentasi yang selanjutnya akan diterbitkan kepada publik dengan membuat sebuah organisasi baru yaitu Tim PPID Kabupaten Pati dimana Diskominfo Kabupaten Pati memiliki tugas untuk menjadi pengelola dalam pelaksanaan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kabupaten Pati. Hal ini berkaitan dengan teori yang penulis ambil dalam dimensi organisasi pelaksana yang salah satu indikatornya adalah pembentukan organisasi baru, dimana dalam implementasi suatu kebijakan untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut berhasil dilaksanakan atau tidak dengan melihat apakah dalam pelaksanaannya terdapat pembentukan organisasi baru.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara, struktur pelaksana PPID di Kabupaten Pati telah dibentuk melalui SK Bupati, dengan PPID Utama berada di bawah Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, serta dibantu oleh PPID Pembantu di setiap SKPD dan kecamatan.

Masing-masing pejabat yang ditunjuk diberikan tugas tambahan sebagai pengelola layanan informasi dan dokumentasi. Struktur ini menunjukkan bahwa koordinasi vertikal antar instansi telah diupayakan secara formal, meskipun masih ditemukan beberapa kesenjangan komunikasi dalam pelaksanaan teknis

3.1.2 Pedoman atau Aturan

Pedoman atau aturan merupakan acuan untuk mengarahkan atau mengatur suatu tindakan atau keputusan. Sebuah aturan sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena merupakan sebuah fondasi untuk menciptakan sistem yang adil, stabil, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam dimensi pedoman atau aturan, terdapat tiga indikator yaitu pembuatan SOP, diskresi, serta pemberian sanksi.

Pemerintah Kabupaten Pati telah membuat dan menetapkan SOP secara rinci dan runtut. Hal ini dilakukan guna meminimalisir kesalahan dalam prosesnya. SOP yang jelas akan mempercepat proses pelayanan informasi dan meminimalkan risiko kesalahan dalam penyampaian informasi. Sehingga, dengan adanya SOP ini juga diharapkan untuk membentuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Teori yang penulis gunakan pada dimensi pedoman atau aturan dalam indikator pertamanya yaitu adanya pembuatan SOP sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pati. Pembuatan SOP ini bertujuan untuk memastikan bahwa segala proses pelaksanaan kebijakan ini dilakukan secara konsisten, efisien, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

PPID Kabupaten Pati juga menerapkan diskresi dalam penerbitan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam Keputusan Sekretaris Daerah selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Pati Nomor 048/1595 Tahun 2024 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kabupaten Pati Tahun 2024 telah diatur hal-hal apa saja yang tidak termasuk informasi publik. Akan tetapi, dalam penerapannya masyarakat bisa mengakses informasi yang dikecualikan tersebut apabila masyarakat melakukan prosedur permohonan informasi, setelah itu PPID akan melakukan pertimbangan apakah informasi yang diminta bisa diberikan atau tidak dengan memperhatikan beberapa pertimbangan seperti peraturan perundang-undangan maupun batas privasi perseorangan ataupun lembaga. Dalam pemberian diskresi, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan serta tidak melanggar aturan serta SOP yang telah ditetapkan. Diskresi bukanlah sesuatu yang digunakan untuk menahan informasi tanpa alasan yang jelas, melainkan sebagai alat untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan sesuai dengan peraturan dan tidak merugikan kepentingan umum.

Adanya pemberian sanksi dalam implementasi keterbukaan informasi publik ini memiliki peranan yang penting untuk memastikan bahwa transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah dapat berjalan dengan baik. Pemberian sanksi berfungsi sebagai alat untuk menegakkan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tanpa sanksi, tidak ada dorongan yang kuat bagi PPID untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.

3.1.3 Anggaran Pelaksanaan

Pada dimensi ini, anggaran pelaksanaan ini biasanya dialokasikan oleh pemerintah daerah melalui anggaran belanja tahunan yang tercatat dalam dokumen APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Anggaran tersebut dialokasikan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika atau instansi terkait yang menangani pelaksanaan PPID. Informasi mengenai anggaran pada pelaksanaan suatu program tidak bisa diakses oleh masyarakat luas karena masuk ke dalam Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK). Maka dari itu, untuk mendapatkan data

tersebut maka diperlukan permohonan informasi kepada PPID. Dalam dimensi anggaran pelaksanaan, terdapat dua indikator yaitu pendapatan serta belanja.

Komponen anggaran utama untuk pelaksanaan PPID yang pertama adalah pengadaan infrastruktur teknologi informasi yang meliputi server, perangkat keras seperti komputer, serta jaringan internet yang mendukung sistem pelayanan informasi publik. Kedua adalah adanya pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM), dimana hal ini penting dilakukan untuk meningkatkan kapasitas para petugas PPID dalam melakukan pelayanan informasi publik. Lalu yang terakhir adalah anggaran untuk sosialisasi dan promosi, yang mana dalam hal ini harus terus dikampanyekan agar masyarakat mengetahui hak mereka untuk memperoleh informasi publik, bagaimana cara mengaksesnya, serta bagaimana cara mengajukan permohonan informasi dengan benar.

3.1.4 Sumber Daya Manusia

Dimensi sumber daya manusia (SDM) dalam pelaksanaan PPID Kabupaten Pati menunjukkan bahwa pengelolaan SDM dilakukan secara internal melalui penunjukan pegawai Diskominfo, khususnya di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), yang telah memiliki keahlian di bidang informasi, pengelolaan arsip, serta teknologi. Meskipun tidak dilakukan rekrutmen terbuka, penunjukan ini dinilai efektif karena SDM yang dilibatkan telah terbiasa dengan tugas-tugas terkait pengelolaan informasi publik. Selain itu, pengembangan SDM dilakukan secara rutin melalui berbagai pelatihan teknis dan non-teknis guna memastikan bahwa petugas PPID mampu mengikuti perkembangan regulasi serta menguasai teknologi informasi terbaru. Upaya ini sejalan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di era digital yang menuntut kecepatan, ketepatan, dan keterbukaan informasi.

Namun demikian, pelaksanaan indikator pemberhentian belum diterapkan secara formal. Dinas lebih memilih memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan atau tertulis jika terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas, karena sejauh ini tidak ditemukan kesalahan fatal dari petugas PPID. Hal ini mencerminkan bahwa penguatan kinerja lebih difokuskan melalui pembinaan daripada sanksi berat. Meskipun demikian, masukan dari pemohon informasi menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapasitas SDM, terutama dalam memahami regulasi baru dan memberikan pelayanan yang responsif. Dengan demikian, kualitas SDM menjadi elemen strategis yang harus terus dikembangkan agar kebijakan keterbukaan informasi dapat diimplementasikan secara optimal, transparan, dan berkelanjutan.

3.1.5 Sumber Daya Teknologi

Dimensi sumber daya teknologi dalam implementasi PPID Kabupaten Pati menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi telah dilakukan secara optimal untuk mendukung keterbukaan informasi publik. Penggunaan sistem manajemen informasi berbasis digital, website resmi PPID, media sosial, serta sistem manajemen dokumen elektronik memungkinkan masyarakat mengakses informasi secara cepat, transparan, dan efisien. Selain itu, PPID Kabupaten Pati juga memanfaatkan media tradisional seperti Radio Suara Pati untuk menjangkau masyarakat di wilayah yang belum terakses teknologi digital secara maksimal. Hal ini menunjukkan adanya upaya inklusif dalam memperluas cakupan layanan informasi, sekaligus membuktikan kesiapan infrastruktur yang memadai meskipun masih terdapat beberapa keterbatasan.

Dalam hal ketetapan penggunaan, PPID Kabupaten Pati telah menerapkan teknologi sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta peraturan teknis terkait pengelolaan informasi dan dokumen publik secara elektronik. Sistem penyimpanan data, keamanan informasi, serta format digital yang terstruktur diterapkan untuk memastikan efisiensi dan akuntabilitas layanan

informasi publik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PPID Kabupaten Pati telah mampu mengelola sumber daya teknologi secara adaptif, terarah, dan berbasis regulasi, sehingga memperkuat pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi di tingkat daerah secara efektif dan berkelanjutan.

3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi di Kabupaten Pati

Pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Pati mendapatkan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, khususnya pemerintah daerah. Dukungan ini tidak hanya bersifat moral, tetapi juga material, berupa pengalokasian anggaran, penyediaan infrastruktur teknologi, serta pelatihan dan pengembangan SDM untuk mendukung operasional PPID. Komitmen pimpinan daerah seperti Bupati, Sekda, dan para kepala SKPD menjadi faktor utama yang mendorong keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga menjadi faktor pendukung penting karena mempermudah penyebaran informasi publik dan meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai data dan dokumen pemerintahan.

Namun demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi sejumlah hambatan. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang paham teknologi, baik dari sisi petugas PPID maupun masyarakat sebagai pengguna layanan informasi. Selain itu, keterbatasan akses internet di beberapa wilayah Kabupaten Pati juga menjadi kendala dalam penyebaran informasi melalui media digital seperti website PPID. Kurangnya literasi digital masyarakat menyebabkan sebagian besar masih datang langsung ke kantor untuk meminta informasi, yang seharusnya dapat dilakukan secara daring. Oleh karena itu, penguatan SDM melalui pelatihan rutin, perbaikan infrastruktur, serta sosialisasi yang lebih masif mengenai hak atas informasi publik menjadi langkah strategis untuk mengatasi hambatan dan memastikan keterbukaan informasi dapat dijalankan secara efektif dan berkelanjutan.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati telah dilakukan sesuai dengan teori implementasi kebijakan menurut Thomas R. Dye, yang mencakup lima dimensi: organisasi pelaksana, pedoman atau aturan, anggaran pelaksanaan, sumber daya manusia, dan sumber daya teknologi. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa secara struktural dan prosedural PPID telah dibentuk dan dijalankan sesuai ketentuan, namun masih terdapat hambatan dalam hal pelaksanaan di lapangan, seperti keterbatasan SDM dan pemanfaatan teknologi yang belum merata. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang keberadaan dan fungsi PPID menjadi kendala tersendiri dalam upaya mendorong partisipasi publik yang aktif. Walaupun terdapat dukungan regulatif dan moral dari pemerintah daerah, keterbatasan kapasitas teknis dan aksesibilitas informasi digital membuat implementasi keterbukaan informasi belum sepenuhnya optimal. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan tidak cukup hanya bertumpu pada aspek legal-formal, tetapi juga pada kesiapan sumber daya, strategi sosialisasi, dan penguatan kapasitas internal serta eksternal.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya oleh Wira Waskito (2024) yang meneliti kualitas pelayanan PPID di Kota Makassar, terdapat kesamaan dalam pentingnya pelayanan informasi publik yang berkualitas dan mudah diakses. Namun berbeda dengan temuan penelitian ini yang lebih menekankan pada sisi pelaksanaan kebijakan dan implementasi teknis PPID, Waskito lebih fokus pada persepsi masyarakat terhadap kualitas

pelayanan. Adapun penelitian oleh Diah Fatma Sjoraida (2015) menunjukkan bahwa di tingkat provinsi, implementasi keterbukaan informasi juga belum optimal karena minimnya komitmen birokrasi. Hal ini sejalan dengan temuan dalam penelitian ini, khususnya pada aspek pelaksanaan kebijakan yang masih menghadapi hambatan internal seperti ketidaksiapan sistem dan pelaksana. Penelitian Dhara Aprilya dan Said Fadhlain (2022) yang berfokus pada peran PPID di Kabupaten Simeulue menunjukkan keberhasilan pelaksanaan PPID secara struktural, namun belum menyentuh aspek partisipasi masyarakat secara mendalam. Sebaliknya, penelitian ini memberikan perhatian besar pada tantangan implementasi yang mencakup aspek teknologi, pemahaman masyarakat, dan kualitas koordinasi antarunit pelaksana. Selain itu, perbandingan juga terlihat dalam studi Angga Perdana dkk. (2018) di Kota Pariaman yang menyoroti lemahnya pelayanan meskipun secara administratif telah tersedia dasar hukum, hal yang juga ditemukan dalam penelitian ini di Kabupaten Pati.

Penelitian ini memberikan kontribusi dengan pendekatan komprehensif terhadap implementasi kebijakan menggunakan teori Dye secara menyeluruh, termasuk perhatian pada dimensi sumber daya teknologi dan pemanfaatan sistem *e-government* melalui *website* PPID Kabupaten Pati. Dimensi ini jarang disentuh secara mendalam dalam studi-studi sebelumnya yang umumnya hanya menyoroti aspek kelembagaan atau komunikasi publik. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat sekaligus memperluas pemahaman mengenai praktik implementasi keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, serta memberikan gambaran kontekstual yang lebih utuh mengenai pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi di Kabupaten Pati.

3.4 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penelitian ini juga menemukan sejumlah temuan menarik yang memberikan dimensi tambahan terhadap pemahaman implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Pati. Salah satu temuan yang cukup menonjol adalah adanya penggunaan media sosial sebagai sarana tidak formal dalam mendistribusikan informasi kepada masyarakat. Meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam pedoman pelaksanaan, pemanfaatan platform seperti *WhatsApp* dan grup media sosial oleh pejabat PPID pembantu di beberapa SKPD justru terbukti mampu meningkatkan kecepatan respon dan jangkauan informasi kepada publik. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi komunikasi informal dapat menjadi pelengkap yang efektif terhadap sistem informasi formal yang berbasis *website*. Selain itu, kesadaran terhadap pentingnya keterbukaan informasi ternyata lebih tinggi pada level teknis seperti pranata humas dan pelaksana PPID dibandingkan dengan pejabat struktural yang memiliki otoritas pengambilan keputusan. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan internal dalam hal pemahaman dan komitmen terhadap keterbukaan informasi, di mana aktor-aktor teknis lebih adaptif terhadap perubahan sistem pelayanan publik, sementara pengambil kebijakan cenderung fokus pada prosedur normatif.

Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada struktur organisasi dan keberadaan regulasi, tetapi juga pada peran aktif individu pelaksana yang mampu merespon tantangan dengan pendekatan yang fleksibel dan inovatif. Dalam konteks ini, kemampuan adaptif serta komunikasi yang dinamis antar unit kerja menjadi faktor pendukung yang tidak kalah penting dari segi formalitas administratif. Temuan ini memperkaya literatur implementasi kebijakan dengan menekankan pentingnya dimensi kultural dan perilaku dalam menjalankan kebijakan publik secara efektif di tingkat lokal.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati telah berjalan dengan cukup efektif berdasarkan lima dimensi implementasi menurut Thomas R. Dye, yaitu organisasi pelaksana, pedoman atau aturan, anggaran pelaksanaan, sumber daya manusia, dan sumber daya teknologi. Pelaksanaan tugas PPID di Kabupaten Pati telah memenuhi aspek formal kelembagaan, ditandai dengan adanya peraturan bupati serta pembentukan struktur PPID utama dan pembantu. Namun demikian, efektivitas implementasi masih menghadapi tantangan, terutama pada keterbatasan sumber daya manusia dan rendahnya tingkat literasi informasi masyarakat. Selain itu, masih ditemui kendala dalam diseminasi informasi secara merata serta pemanfaatan teknologi yang belum optimal. Dinas Kominfo Kabupaten Pati melalui PPID telah menunjukkan komitmen dalam meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi dengan berbagai upaya seperti pengembangan website resmi dan penyusunan SOP pelayanan informasi. Namun, untuk mencapai transparansi dan partisipasi publik yang maksimal, diperlukan peningkatan kapasitas SDM, penyempurnaan sarana teknologi informasi, serta penguatan sinergi antara PPID utama dan PPID pembantu. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik tidak hanya memerlukan regulasi yang memadai, tetapi juga sinergi antar aktor, kesiapan kelembagaan, dan inovasi pelayanan informasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, PPID memiliki peran strategis dalam mewujudkan prinsip good governance di Kabupaten Pati.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam aspek waktu pelaksanaan yang relatif singkat, yaitu hanya sekitar satu bulan. Kondisi tersebut mempengaruhi ruang lingkup observasi dan kedalaman analisis, khususnya dalam melihat proses implementasi PPID secara menyeluruh yang idealnya membutuhkan pemantauan dalam jangka waktu lebih panjang. Selain itu, penelitian ini masih terbatas pada pendekatan kualitatif deskriptif sehingga belum dapat menggambarkan secara kuantitatif sejauh mana dampak implementasi kebijakan terhadap peningkatan akses informasi publik di masyarakat.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari bahwa ruang lingkup penelitian ini masih bersifat awal dan belum mencakup seluruh aspek penting dalam implementasi keterbukaan informasi publik. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan kuantitatif guna mengukur dampak implementasi PPID terhadap kualitas pelayanan informasi publik serta partisipasi masyarakat. Penelitian komparatif antar daerah juga penting dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai variasi praktik PPID dan faktor-faktor keberhasilannya. Selain itu, integrasi teknologi informasi seperti pengembangan aplikasi mobile dan sistem e-PPID dapat dijadikan fokus penelitian lanjutan, guna melihat sejauh mana digitalisasi berdampak terhadap kecepatan pelayanan dan keterjangkauan informasi. Aspek lain yang juga perlu dikaji lebih dalam adalah pengaruh kepemimpinan lokal, budaya organisasi, serta dinamika politik dalam proses pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi, mengingat faktor-faktor tersebut seringkali menjadi determinan keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan publik.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama penulis tujuhan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pati beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta kepada seluruh pihak yang telah membantu, mendukung, dan berkontribusi dalam kelancaran serta kesuksesan pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Aprilya, Dhara., Fadhlain, Said. 2022. Peran Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Simeulue Dalam Pelayanan Dan Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(6), 752-763.
- Dye, T. R. 2017. Understanding Public Policy. In *Understanding Public Policy (Fifteenth)*.
- Handoyo, Eko. 2012. Kebijakan Publik. Semarang: Penerbit Widya Karya.
- Indah, Tiara., Hariyanti, Puji. 2018. Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya. *Jurnal Komunikasi*, 12(2), 127-140.
- Indrajit, Richardus Eko. 2007. *Electornic Governement In Action*. Aptikom.
- Janowski, T., Pardo, T. A., & Davies, J. (2012). Government information networks-mapping electronic governance cases through public administration concepts. *Government Information Quarterly*, 29, S1-S10. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2011.11.003>.
- Layne, K., & Lee, J. 2001. Developing fully functional E-government: A four stage model. *Government Information Quarterly*, 18(2), 122–136.
- Nurdin, Ismail., Hartati, Sri. 2018. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Perdana, Angga., Asrinaldi & Asmawi. 2018. Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kota Pariaman. *JISPO*, 8(2), 72-87.
- Septina, A. D., Rianti, A., Iqbal, M., Sihombing, V. S., & Rahmayanti, A. Z. (2025). IMPLEMENTATION ANALYSIS OF PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE POLICY: A CASE STUDY OF THE FOREST MANAGEMENT TECHNICAL PERSONEL INFORMATION SYSTEM (THE SIGANISHUT). *Indonesian Journal of Forestry Research*, 12(1), 99-114. <https://doi:10.59465/ijfr.2025.12.1.99-11499>.
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan* (2nd ed.). Penerbit Alfabeta.
- Sjoraida, Diah Fatma. 2015. Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Sosiohumaniora*, 18(3), 212-219.
- Wahyudi, O. A., & Kom, W. Z. S. PENERAPAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK MELALUI APLIKASI PORTAL EMAS KOTA PROBOLINGGO. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/14972>.
- Waskito, Muh. Wira. 2024. Kualitas Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dalam Menyediakan Informasi Publik Kepada Masyarakat Kota Makassar. Skripsi: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Zhang, L., Mol, A. P., & He, G. (2016). Transparency and information disclosure in China's environmental governance. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 18, 17-24. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2015.03.009>.